

Al-Jaami' li Ahkamil Quran, Karya Al-Qurthuby, Ayatul Ahkam Karya Muhammad Husen alThaba Thabai al-Yazd

Muhammad Fadhil Mubarak¹, Hidayat Azhar Al Ikhlah², Ulfa Hidayatus Salsabila³, Akhmad Dasuki⁴

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia ^{1,2,3,4}

Corresponding Author: fadhilmuhammed524@gmail.com^{1*}, hidayatazhar567@gmail.com², ulfahidayatussalsabilaa@gmail.com³, uinpalangkaraya@gmail.com⁴

Info Artikel

Received: 04 September 2026

Revised : 11 September 2026

Accepted: 24 September 2026

Published: 30 September 2026

Keywords: Ayatul Ahkam, Tafsir Al-Qurthubi, Al-Thabathaba'i Al-Yazdi, Legal Deduction, Comparative Jurisprudence.

Kata Kunci: Ayatul Ahkam, Tafsir Al-Qurthubi, Al-Thabathaba'i Al-Yazdi, Istibath Hukum Fikih Komparatif.

Abstract

This study aims to analyze and compare the methodology of interpreting legal verses (ayat al-ahkam) in Al-Jaami' li Ahkamil Qur'an by Imam Al-Qurthubi (representing the Sunni/Maliki jurisprudence tradition) and Ayatul Ahkam by Sayyid Muhammad Husain Al-Thabathaba'i Al-Yazdi (representing the Shia/Ja'fari tradition). Employing a qualitative library research method alongside a comparative jurisprudence (fiqh muqaran) and hermeneutic approach, this research examines the structure of presentation, mechanisms of legal deduction (istinbath), and the impact of school-of-thought (madhhab) nuances on their respective conclusions. The findings indicate that Al-Qurthubi utilizes a balanced narrational and linguistic framework while objectively highlighting multi-school jurisprudential issues. Conversely, Al-Thabathaba'i Al-Yazdi emphasizes a systematic-thematic analysis rooted in usul al-fiqh principles and textual evidence contextualized within the Ahlulbayt tradition. This study concludes that despite their foundational differences in legal deduction principles and sectarian tendencies, both works offer significant contributions to the enrichment of Qur'an-based Islamic jurisprudence.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan metodologi penafsiran ayat-ayat hukum (ayat al ahkam) dalam kitab Al-Jaami' li Ahkamil Qur'an karya Imam Al-Qurthubi (representasi ulama Ahlussunnah/Mazhab Maliki) dan kitab Ayatul Ahkam karya Sayyid Muhammad Husain Al-Thabathaba'i Al-Yazdi (representasi ulama Syiah/Ja'fari). Penelitian kualitatif berjenis studi pustaka (library research) ini menggunakan pendekatan fikih komparatif (fiqh muqaran) serta hermeneutika tafsir untuk meneliti struktur penyajian, pendekatan istinbath hukum, dan implikasi perbedaan madzhab terhadap hasil penafsiran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qurthubi cenderung mengaplikasikan pendekatan riwayat dan kebahasaan yang berimbang dengan tetap menyoroti isu-isu fikih sektoral secara objektif. Sementara itu, Al-Thabathaba'i Al-Yazdi menekankan pembacaan tematis-sistematis berbasis prinsip-prinsip usul fiqh dan tekstualitas ayat dengan rujukan tradisi keilmuan Mazhab Ahlulbayt. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun kedua karya tersebut memiliki perbedaan mendasar pada tradisi istinbath dan kecenderungan mazhab, keduanya memberikan kontribusi signifikan dalam pengayaan khazanah hukum Islam berbasis Al-Qur'an.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Al-Qur'an diturunkan sebagai sumber utama petunjuk dan tata hukum bagi kehidupan manusia. Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat hukum (āyāt al-aḥkām) yang memerlukan proses pengkajian mendalam (istinbāt) agar dapat ditransformasikan menjadi hukum-hukum fikih yang praktis. Keberagaman metodologi yang digunakan oleh para mufasir dan ahli fikih dalam menggali hukum Al-Qur'an melahirkan khazanah pemikiran Islam yang kaya dan dinamis.

Perkembangan keilmuan tafsir ahkam melahirkan dua karya monumental dari dua tradisi mazhab besar Islam. Pertama, kitab *Al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān* karya Imam Al-Qurṭubī yang mewakili pemikiran Ahlussunnah wal Jama'ah dengan latar belakang Fikih Maliki. Kedua, kitab *Āyāt Al-Aḥkām* karya Sayyid Muḥammad Ḥusain Al-Ṭabāṭabā'ī Al-Yazdī yang mewakili tradisi intelektual Syiah Imamiya (Ja'fari). Kedua mufasir ini tidak hanya berbeda dalam latar belakang mazhab teologi dan hukum, tetapi juga dalam struktur penulisan dan mekanisme penetapan hukum (istinbāt).

Kebutuhan akan pemahaman fikih komparatif (fiqh muqāran) yang objektif di era modern menjadikan analisis mendalam terhadap kedua karya ini sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara deskriptif-analitis sistematika, pendekatan kebahasaan, penggunaan riwayat, serta penerapan istinbāt hukum dari Imam Al-Qurṭubī dan Sayyid Al-Yazdī melalui berbagai contoh studi kasus hukum dalam Al-Qur'an.¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Sumber data primer yang digunakan meliputi naskah kitab *Al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān* karya Imam Al-Qurṭubī dan kitab *Āyāt Al-Aḥkām* karya Sayyid Muḥammad Ḥusain Al-Ṭabāṭabā'ī Al-Yazdī. Data sekunder diperoleh dari literatur pendukung seperti kitab-kitab *uṣūl al-fiqh*, sejarah hukum Islam, dan artikel jurnal relevan.

Data dihitung dan diklasifikasikan dengan menggunakan pendekatan komparatif (*comparative*

¹ Kusuma, Y. P., Munzir, A., & Ismail, H. (2025). The application of the principle al-'Ibrah bi 'Umūm al-Lafz in al-Qurṭubī's Tafsīr: An analysis of legal verses. *Priviet Social Sciences Journal*. <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i12.1170>

approach) dan hermeneutika tekstual. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan langkah-langkah: (1) Mengidentifikasi struktur penulisan kitab, (2) Membandingkan mekanisme penetapan dalil pada ayat-ayat hukum tertentu, dan (3) Menyimpulkan perbedaan serta persamaan metodologis kedua mufasir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil dan Karakteristik Metodologis Penulis Imam Al-Qurṭubī (Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān) Imam Al-Qurṭubī (w. 671 H) menyusun tafsir tahlīlī yang mencakup 30 juz Al-Qur'an. Meskipun bermazhab Maliki, Al-Qurṭubī bersikap sangat fair dan objektif (iṣṣāf). Beliau memaparkan pandangan berbagai mazhab (Hanafi, Syafi'i, Hanbali) dan tidak segan mengkritik mazhabnya sendiri jika dalil mazhab lain dianggap lebih kuat secara sanad maupun matan. Metodenya ditandai dengan kedalaman analisis gramatikal (nahwu, sharaf), penelusuran asbāb al-nuzūl, dan penggunaan hadis.
2. Sayyid Muḥammad Ḥusain Al-Ṭabāṭabā'ī Al-Yazdī (Āyāt Al-Aḥkām) Sayyid Al-Yazdī menyusun kitab hukum dengan sistematika mawḍū'ī yang disesuaikan dengan bab-bab fikih klasik. Pendekatannya didasarkan pada analisis kaidah uṣūl al-fiqh yang ketat, tekstualitas ayat, serta memperkuat argumentasi menggunakan riwayat-riwayat sah dari jalur Ahlulbayt (Imam-Imam Mazhab Ja'fari).²
3. Studi Kasus Komparasi Istinbāt Hukum Studi Kasus

Usul Mengusap Kepala dalam Wudhu

وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ

"Dan usaplah kepalamu..." (QS. Al-Mā'idah: 6)

Analisis Imam Al-Qurṭubī: Al-Qurṭubī menganalisis huruf bā' (ب) pada kata biru'ūsikum. Beliau memaparkan perbedaan ulama:

1. Mazhab Maliki & Hanbali: Mengusap seluruh kepala adalah wajib, karena huruf bā' berfungsi sebagai zā'idah (penegas) atau ilṣāq (menempelkan usapan).
2. Mazhab Syafi'i: Wajib mengusap sebagian kecil kepala saja, karena bā' bermakna tab'īḍ (sebagian).

² Syam, M. F. M., Athoillah, & Khosim, A. (2026). *Jurisprudential Approaches to Qur'anic Interpretation: An Analysis of the Characteristics of Tafsir Fiqhi Works from an Islamic Law Perspective*. <https://doi.org/10.70308/adagium.v4i1.274>

3. Mazhab Hanafi: Wajib mengusap seperempat kepala. Al-Qurṭubī memaparkan argumen masing-masing mazhab secara rinci dengan melampirkan riwayat hadis wudhu Nabi Muhammad SAW, kemudian mengkritisi argumen kebahasaan masing-masing secara seimbang.³

Analisis Muhammad Husen Al-Ṭabāṭabā'ī Al-Yazdī: Al-Yazdī menguatkan pandangan Mazhab Ja'fari bahwa kewajiban mengusap kepala hanyalah pada sebagian kepala depan (nāṣiyah), tanpa menggunakan air baru (cukup sisa basahan tangan). Pendekatannya menggunakan kaidah gramatika bahwa huruf bā' pada ayat ini secara eksplisit bermakna tab'īd (sebagian). Pembuktian ini diperkuat dengan riwayat-riwayat dari Imam Ja'far Al-Sadiq yang menegaskan penafsiran huruf bā' sebagai pemisah (tab'īd).⁴

Hukum Qisas dan Maaf dari Ahli Waris

"كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ... فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ"

Diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh... Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik..." (QS. Al-Baqarah: 178)⁵

Analisis Imam Al-Qurṭubī: Al-Qurṭubī membagi pembahasan ayat ini menjadi puluhan masalah fikih (masā'il). Beliau membahas:

1. Hak wali korban dalam memilih antara qisas, menerima diat (ganti rugi), atau memaafkan secara gratis.
2. Perbedaan pendapat mengenai syarat persetujuan pembunuh jika hukuman diubah menjadi diat (Mazhab Maliki vs Mazhab Syafi'i). Al-Qurṭubī juga menguraikan konteks sosiologis asbāb al-nuzūl bangsa Arab jahiliyah yang sering melampaui batas dalam pembalasan pembunuhan, sehingga ayat ini turun sebagai bentuk keadilan hukum.⁶

Analisis Muhammad Husen Al-Ṭabāṭabā'ī Al-Yazdī menelaah aspek uṣūlī mengenai frasa faman 'ufi'ya lahu. Beliau menegaskan bahwa qisas adalah hak mutlak ahli waris korban (waliyul dam). Jika salah satu wali memaafkan, hukuman mati (qisas) batal secara otomatis dan beralih ke

³ Muna, N. Q., & Kholik, J. A. (2025). Comparative Analysis of Madzhab Zahiriyah and the Madzahib al-Arba'ah through the Study of the Book al-Ittihad al-Fiqhiyah 'Inda Ashabil Hadith. *Santri*. <https://doi.org/10.35878/santri.v6i2.1809>

⁴ Pendidikan, J., Dan, T., Wudhu, Alvionika, V., Safitri, R., & Elviani. (2025). Mahasin At-Ta'wil Karya Jamaluddin Al-Qasamy. *Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.61104/qd.v1i2.494>

⁵ Darussamin, Z. (2014). Qisas Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Masa Kini. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*. <https://doi.org/10.14421/ajish.v48i1.82>

⁶ Ghobishavi, A., Vahedyarijan, Y., & Shahabi, R. (n.d.). *Comparative Analysis of the Dissociative and Collective Theories of Qisas in Islamic Jurisprudence and Their Impact on the Iranian Legal System*. <https://doi.org/10.61838/kman.isslp.4.3.10>

kewajiban diat (apabila disepakati). Al-Yazdī menyusun masalah ini secara sistematis di bawah bab Kitāb Al-Qiṣāṣ dengan merujuk pada teks-teks riwayat Ahlulbayt.⁷

Pernikahan Mut'ah / Nikah Sementara

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban..." (QS. An-Nisā': 24)⁸

Analisis Imam Al-Qurṭubī:

Al-Qurṭubī menguraikan ayat ini dari sudut pandang sejarah hukum (tārīkh al-tasjīr'). Beliau mengakui bahwa pernikahan Mut'ah pernah diperbolehkan pada masa awal Islam, tetapi menegaskan bahwa hukum tersebut telah di-nasakh (dihapus/dibatalkan) secara resmi oleh Hadis Nabi SAW pada Perang Khaibar dan Fathu Makkah. Al-Qurṭubī memaparkan kesepakatan empat mazhab Ahlussunnah mengenai keharaman nikah Mut'ah secara permanen.⁹

Analisis Muhammad Husen Al-Ṭabāṭabā'ī Al-Yazdī:

Al-Yazdī mempertahankan hukum kebolehan nikah Mut'ah berbasis makna eksplisit lafal istamta'tum pada QS. An-Nisā': 24. Beliau berargumen secara uṣūlī bahwa tidak ada ayat Al-Qur'an maupun riwayat yang secara sah meng-nasakh ayat tersebut. Beliau menggunakan riwayat-riwayat sahabat dan riwayat Imamiya untuk menegaskan bahwa keharaman mut'ah merupakan ketetapan ijtihad politik di era khalifah kedua, bukan dari pembatalan (nasakh) wahyu Nabi.¹⁰

Keharaman dan Batas Usap Riba

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah: 275 & 278-279)

Analisis Imam Al-Qurṭubī:

Al-Qurṭubī menelaah secara luas jenis-jenis riba (Riba Al-Faḍl dan Riba Al-Nasī'ah). Beliau

⁷ Kholiq, A., & Haerany, A. (2025). *Amnesty And Abolition From The Perspective Of Fiqh Jinayah*. <https://doi.org/10.62885/legisci.v3i3.993>

⁸ Gumus, S. (2025). Mut'ah and Its Evaluation Through the Interpretation of Surah An-Nisa, Verse 24 in Taberī and Tabersī. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 12(2), 875–897. <https://doi.org/10.51702/esoguifd.1669549>

⁹ Ja'fari, M., Pahlevani, M., & Nabavi, S. (2025). A Comparative Study of Narrations in Kāfī of Kulaynī and Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Regarding Temporary Marriage (Mut'ah). *International Journal of Social Science Research and Review*. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v8i12.3108>

¹⁰ Gumus, S. (2025). Mut'ah and Its Evaluation Through the Interpretation of Surah An-Nisa, Verse 24 in Taberī and Tabersī. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 12(2), 875–897. <https://doi.org/10.51702/esoguifd.1669549>

mengaitkannya dengan masalah ekonomi praktis, perdagangan perak/emas, serta transaksi komoditas makanan. Al-Qurṭubī mengutip berbagai pertentangan fikih antara Mazhab Maliki dan Hanafi mengenai 'illat (alasan hukum) keharaman riba pada barang-barang selain emas dan perak.¹¹

Analisis Muhammad Husen Al-Ṭabāṭabā'ī Al-Yazdī:

Al-Yazdī menempatkan ayat ini dalam struktur tematis Kitāb Al-Tijārah. Beliau berfokus pada analisis pembatasan hukum riba dalam lingkup muamalah, batasan rukun akad jual beli, serta pengecualian-pengecualian hukum riba (seperti hukum riba antara orang tua dan anak, atau antara suami dan istri) berdasarkan ketetapan riwayat fikih Ja'fari.¹²

Hukum Pembuktian Kasus Zina & Tuduhan Zina / Qadzaf

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَا يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali deraan..." (QS. An-Nūr: 4)¹³

Analisis Imam Al-Qurṭubī:

Al-Qurṭubī menguraikan secara rinci kriteria empat orang saksi laki-laki yang adil. Beliau membahas pertentangan fikih antara Mazhab Maliki dan Syafi'i mengenai gugurnya kesaksian penuduh (qādzif) di masa depan meskipun ia telah bertobat. Al-Qurṭubī mendukung pandangan bahwa tobat dapat memulihkan hak kesaksian seseorang berdasarkan pengecualian ayat berikutnya (illā alladzīna tābū).¹⁴

Analisis Muhammad Husen Al-Ṭabāṭabā'ī Al-Yazdī:

Al-Yazdī menyusun ayat ini di bawah bab Kitāb Al-Ḥudūd. Beliau menekankan kepastian persyarat kewajiban saksi harus melihat secara langsung (al-mu'āyanah) tanpa keraguan. Beliau merujuk pada ketetapan riwayat Ahlulbayt bahwa jika saksi kurang dari empat orang (misalnya hanya tiga orang), maka ketiga saksi tersebut justru dijatuhi hukuman cambuk qadzaf karena tuduhan tanpa

¹¹ Rezki, M., Munawwarah, H., Rahman, P., Triansyah, H., Prasetyo, A., & Ariza, F. N. (2024). Analisis Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 275-279 Tentang Riba. *JURNAL RISET RUMPUN AGAMA DAN FILSAFAT*. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v3i2.8053>

¹² Rezki, M., Munawwarah, H., Rahman, P., Triansyah, H., Prasetyo, A., & Ariza, F. N. (2024). Analisis Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 275-279 Tentang Riba. *JURNAL RISET RUMPUN AGAMA DAN FILSAFAT*. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v3i2.8053>

¹³ Ismail, A. I. Md., Suhardi, M. S. S., & Yusli, A. Y. (2022). Keabsahan bukti dalam pendakwaan jenayah qazaf: sorotan pandangan muktamad empat mazhab. *I*(2), 56–82. <https://doi.org/10.64638/jj.v1i2.004>

¹⁴ *Understanding Women's Testimony in Islamic Jurisprudence: Debunking Common Myths*. (2024). <https://doi.org/10.13140/rg.2.2.28046.37448>

bukti lengkap.¹⁵

Bagian Waris Anak Perempuan / Kalalah

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan..." (QS. An-Nisā': 11 & 176)¹⁶

Analisis Imam Al-Qurṭubī:

Al-Qurṭubī memaparkan hukum waris Islam dengan memperbandingkannya dengan tradisi Jahiliyah yang membatasi warisan hanya untuk laki-laki dewasa. Dalam masalah anak perempuan ganda (itsnataini fawqa), Al-Qurṭubī menjelaskan konsep 'Aul (peningkatan penyebut saham waris jika harta tidak mencukupi) yang disepakati oleh mayoritas Sahabat (seperti Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud) dan 4 Mazhab Sunni.¹⁷

Analisis Muhammad husen Al-Ṭabāṭabā'ī Al-Yazdī:

Al-Yazdī mengurai ayat waris berdasarkan sistem pembagian waris Mazhab Ja'fari (Thabaqāt al-Irth / Tingkatan Waris). Berbeda dengan tradisi Sunni, Al-Yazdī menolak sistem 'Aul dan Ta'sīb (sisa harta untuk kerabat laki-laki/asabah). Menurut penafsirannya berbasis riwayat Imam Ja'far Al-Sadiq, kekuarangan atau kelebihan saham waris tidak dibagikan ke kerabat jauh (asabah), melainkan disesuaikan hanya pada tingkatan utama (thabaqah) keluarga terdekat¹⁸

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān karya Imam Al-Qurṭubī dan Āyāt al-Ahkām karya Muhammad Husain Al-Ṭabāṭabā'ī Al-Yazdī memiliki perbedaan metodologis dalam menafsirkan dan mengistinbāt hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an. Al-Qurṭubī cenderung menggunakan pendekatan taḥlīlī dengan memadukan analisis kebahasaan, riwayat, asbāb al-nuzūl, hadis, serta perbandingan pendapat antarmazhab. Sementara itu, Al-Yazdī menggunakan pendekatan

¹⁵ Yadaniz, A., Ahmari, H., & Rajaeipour, M. (n.d.). *Jurisprudential Analysis of Moharebeh from Shiite and Sunni Perspectives and the Foundations of Its Proof*. <https://doi.org/10.61838/iki.241>

¹⁶ Sarjan, A., & Sarjan, A. (2021). *Problematika hak waris saudara dalam kewarisan kalalah*. 1(1), 97–108. <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v1i1.4038>

¹⁷ Bahri, S., Eficandra, E., Hirawan, Y., Bahri, S., Eficandra, E., & Hirawan, Y. (2024). Agreement in the division of inheritance assets: perspectives from maqasid shariah and the compilation of islamic law. *Al Ushuliy*, 3(1), 39–39. <https://doi.org/10.31958/alushuliy.v3i1.12084>

¹⁸ Ubaidillah, M. B., & Zahro, N. F. (2024). Historitas evolusi sistem kewarisan islam. *Usratuna*, 7(2), 1–21. <https://doi.org/10.65356/usratuna.v7i2.594>

yang lebih sistematis dan tematis berdasarkan konstruksi uşul al-fiqh serta riwayat dalam tradisi Ahlulbait.

Perbedaan latar belakang mazhab turut memengaruhi hasil istinbāt hukum kedua mufasir, sebagaimana terlihat dalam pembahasan mengenai wudhu, qisas, nikah mut'ah, riba, qadzaf, dan kewarisan. Meskipun demikian, perbedaan tersebut tidak mengurangi kontribusi keduanya dalam pengembangan khazanah tafsir ahkam. Sebaliknya, keragaman metodologi tersebut menunjukkan dinamika intelektual dalam tradisi hukum Islam serta pentingnya pendekatan fikih komparatif dalam memahami perbedaan penafsiran secara objektif dan akademis.

Dengan demikian, studi komparatif terhadap kedua kitab ini menegaskan bahwa perbedaan produk hukum tidak hanya disebabkan oleh perbedaan kesimpulan, tetapi juga oleh perbedaan sumber, metode, dan kerangka epistemologis yang digunakan dalam proses istinbāt hukum. Kedua karya tersebut memiliki kontribusi signifikan dalam memperkaya diskursus hukum Islam berbasis Al-Qur'an.

SARAN

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian komparatif terhadap tafsir ahkam dengan cakupan yang lebih spesifik, terutama melalui analisis mendalam pada tema-tema hukum tertentu. Selain itu, diperlukan penelitian lanjutan mengenai relevansi metodologi istinbāt kedua mufasir terhadap perkembangan persoalan hukum Islam kontemporer.

Kajian fikih komparatif juga perlu dikembangkan dengan pendekatan yang objektif dan dialogis agar perbedaan mazhab tidak hanya dipahami sebagai perbedaan hasil hukum, melainkan sebagai bagian dari kekayaan metodologis dan intelektual dalam tradisi keilmuan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusuma, Y. P., Munzir, A., & Ismail, H. (2025). The application of the principle al-‘Ibrah bi ‘Umūm al-Lafz in al-Qurṭubī’s Tafsīr: An analysis of legal verses. *Priviet Social Sciences Journal*. <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i12.1170>
- Kamali, M. H. (2025). *Identification of Maqasid in the Revealed Sources*. 29–37. <https://doi.org/10.1093/9780197786390.003.0005>
- Manaf, A. M. A., & Manaf, A. M. A. (2023). *Empat metode dalam penafsiran al-qur'an*. 3(2), 212–237. <https://doi.org/10.62359/tafakkur.v3i2.133>
- Syam, M. F. M., Athoillah, & Khosim, A. (2026). *Jurisprudential Approaches to Qur'anic Interpretation: An Analysis of the Characteristics of Tafsir Fiqhi Works from an Islamic Law*

Perspective. <https://doi.org/10.70308/adagium.v4i1.274>

- Muna, N. Q., & Kholik, J. A. (2025). Comparative Analysis of Madzhab Zahiriyah and the Madzahib al-Arba'ah through the Study of the Book al-Ittijahat al-Fiqhiyah 'Inda Ashabil Hadith. *Santri*. <https://doi.org/10.35878/santri.v6i2.1809>
- Pendidikan, J., Dan, T., Wudhu, Alvionika, V., Safitri, R., & Elviani. (2025). Mahasin At-Ta'wil Karya Jamaluddin Al-Qasamy. *Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.61104/qd.v1i2.494>
- Darussamin, Z. (2014). Qisas Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Masa Kini. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*. <https://doi.org/10.14421/ajish.v48i1.82>
- Ghobishavi, A., Vahedyarijan, Y., & Shahabi, R. (n.d.). *Comparative Analysis of the Dissociative and Collective Theories of Qisas in Islamic Jurisprudence and Their Impact on the Iranian Legal System*. <https://doi.org/10.61838/kman.isslp.4.3.10>
- Kholiq, A., & Haerany, A. (2025). *Amnesty And Abolition From The Perspective Of Fiqh Jinayah*. <https://doi.org/10.62885/legisci.v3i3.993>
- Gumus, S. (2025). Mut'ah and Its Evaluation Through the Interpretation of Surah An-Nisa, Verse 24 in Taberî and Tabersî. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 12(2), 875–897. <https://doi.org/10.51702/esoguifd.1669549>
- Ja'fari, M., Pahlevani, M., & Nabavi, S. (2025). A Comparative Study of Narrations in Kāfî of Kulaynî and Şāḥih al-Bukhārî Regarding Temporary Marriage (Mut'ah). *International Journal of Social Science Research and Review*. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v8i12.3108>
- Gumus, S. (2025). Mut'ah and Its Evaluation Through the Interpretation of Surah An-Nisa, Verse 24 in Taberî and Tabersî. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 12(2), 875–897. <https://doi.org/10.51702/esoguifd.1669549>
- Rezki, M., Munawwarah, H., Rahman, P., Triansyah, H., Prasetyo, A., & Ariza, F. N. (2024). Analisis Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 275-279 Tentang Riba. *JURNAL RISET RUMPUN AGAMA DAN FILSAFAT*. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v3i2.8053>
- Rezki, M., Munawwarah, H., Rahman, P., Triansyah, H., Prasetyo, A., & Ariza, F. N. (2024). Analisis Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 275-279 Tentang Riba. *JURNAL RISET RUMPUN AGAMA DAN FILSAFAT*. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v3i2.8053>
- Ismail, A. I. Md., Suhardi, M. S. S., & Yusli, A. Y. (2022). *Keabsahan bukti dalam pendakwaan jenayah qazaf: sorotan pandangan muktamad empat mazhab*. 1(2), 56–82. <https://doi.org/10.64638/jj.v1i2.004>
- Understanding Women's Testimony in Islamic Jurisprudence: Debunking Common Myths*. (2024). <https://doi.org/10.13140/rg.2.2.28046.37448>
- Yadaniz, A., Ahmari, H., & Rajaeipour, M. (n.d.). *Jurisprudential Analysis of Moharebeh from Shiite and Sunni Perspectives and the Foundations of Its Proof*. <https://doi.org/10.61838/iki.241>

- Sarjan, A., & Sarjan, A. (2021). *Problematika hak waris saudara dalam kewarisan kalalah*. 1(1), 97–108. <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v1i1.4038>
- Bahri, S., Eficandra, E., Hirawan, Y., Bahri, S., Eficandra, E., & Hirawan, Y. (2024). Agreement in the division of inheritance assets: perspectives from maqasid shariah and the compilation of islamic law. *Al Ushuliy*, 3(1), 39–39. <https://doi.org/10.31958/alushuliy.v3i1.12084>
- Ubaidillah, M. B., & Zahro, N. F. (2024). Historitas evolusi sistem kewarisan islam. *Usratuna*, 7(2), 1–21. <https://doi.org/10.65356/usratuna.v7i2.594>